

**PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA KREDIT KONSUMTIF APARATUR SIPIL NEGARA  
DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CABANG UTAMA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan*

**Oleh :**



**Pembimbing :**

- 1. PROF. FIRMAN HASAN, SH., LL.M.**
- 2. SYAHRIAL RAZAK, SH., MH.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA KREDIT KONSUMTIF APARATUR SIPIL NEGARA  
DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CABANG UTAMA PADANG**

(Indra Ismanto, 1520123065, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 126 Halaman, 2017)

**ABSTRAK**

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bagi bank dalam memperoleh pendapatan. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, analisis pemberian kredit, dan upaya yang akan dilakukan jika terdapat kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimana perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 2) Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum dengan didukung fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merubah ketentuan pemberian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Terhadap kredit bermasalah dengan kolektabilitas kredit dalam perhatian khusus dan kredit kurang lancar, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang melakukan upaya peyelamatan kredit, sedangkan terhadap kredit dengan kolektabilitas kredit yang diragukan dan kredit macet, dalam upaya penyelesaiannya diserahkan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Pusat untuk menyelesaikannya baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

*Kata kunci : Kredit macet ASN.*

**COMPLETION CREDIT ON NON-PERFORMING LOANS  
OF CIVILIAN STATE APPARATUS  
IN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CABANG UTAMA PADANG**

(Indra Ismanto, 1520123065, Master of Notary, Faculty of Law,  
University of Andalas, 126 Pages, 2017)

**ABSTRACT**

Loan is the main activity for banks in obtaining income. The amount of credit disbursed will determine the profitability and business continuity of a bank. Therefore, the provision of credit should be done with the best regulation, ranging from planning the amount of credit, credit analysis, and efforts to be judged when there is bad credit. This study aims to find out about: 1) How consumptive credit agreement of State Civil Apparatus at *PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*. 2) How the settlement efforts made by *PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang* against non-performing loans in consular credit agreement of State Civil Apparatus. The approach method used in this research is empirical juridical. The empirical juridical method is firstly approach that examines secondary data, and then proceed with conducting primary data research in the field. It means, this research is conducted by doing assessment and processing of research data with the starting point on the legal aspects of normative accompanied by theoretical legal studies supported by empirical facts in the field. The results showed that with the enactment of Law Number 5 of 2014 on State Civil Apparatus did not change the provision of consumer credit Civil State Apparatus in *PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*. Through the problems of non performing loan with the special collectability and substandard credit, *PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang* undertakes efforts by credit saly, while the credit with doubtful credit collectibility and non-performing loan, in a settlement effort submitted to the *PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat* to resolve both litigation and non-litigation.

*Keywords: Non-performing Loan ASN.*